

Perpres Tata Kelola MBG Ditarget Rampung

Dari Halaman 1

Pras menyebut hingga kini rancangan Perpres tersebut masih terus dalam tahap penyempurnaan. "Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak

menjalankan prosedur seperti yang seharusnya," ucapnya.

Prabowo sebelumnya disebut akan menerbitkan Perpres Tata Kelola MBG. Hal itu diungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang menyebut saat ini perpres tersebut tengah dirancang.

Dadan menyebut dukungan terhadap program MBG sangat penting dilakukan, mengingat maraknya kasus keracunan.

Ia mengatakan setelah Perpres tersebut terbit, ia bersama lintas kementerian akan bekerja lebih erat lagi satu sama lain.

"Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10). **(cnni/js)**

Jokowi Temui Prabowo di Tengah Isu Ijazah Palsu

Dari Halaman 1

apa untuk beberapa hal," ucapnya. Pras mengatakan Prabowo dan Jokowi secara silih berganti saling mengunjungi untuk bersilaturahmi. Ia menyebut Prabowo juga kerap mengunjungi Jokowi saat ia tengah berada di Jawa Tengah, begitupun sebaliknya. Jokowi dan Prabowo bertemu di kediaman Prabowo di Kartanegara IV, Jakarta, Sabtu (4/10).

"Pertemuan berlangsung empat mata," kata ajudan Jokowi, Kompok Syarif Muhammad Fitriansyah.

Di Kartanegara juga hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Samsuoddin dan Mendikti Saintek Brian Yulianto.

Seperti diketahui, kabar terakhir terkait

ijazah Presiden Jokowi yang heboh beberapa bulan terakhir, kini masuk ke babak baru. Roy Suryo Cs kini telah mengantongi fotocopy ijazah Presiden ke 7 yang diperoleh dari KPU.

"Barusan saya dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Alhamdulillah, berkat doa dari teman-teman semua dan berkat doa dari para senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan sampel ijazah palsunya Jokowi resmi dari KPU," teriak Roy Suryo yang disambut riuh massa aksi.

Temuan ini, menurutnya, akan menjadi amunisi baru untuk membuktikan tudingannya. Ia menegaskan bahwa sampel yang didapat dari KPU identik dengan hasil penelitiannya selama ini dan akan segera diuji lebih lanjut untuk memperkuat bukti.

"Persis sama dengan yang kami teliti. Dan

akan kami uji ulang dengan ELA," ujar pria kelahiran Yogyakarta itu dengan penuh semangat.

Dengan bukti yang diklaimnya resmi dari KPU tersebut, Roy Suryo merasa posisinya di atas angin dalam menghadapi laporan hukum yang ditujukan kepadanya. Ia optimistis tidak bisa dijerat pidana pencemaran nama baik dan justru laporannya di Bareskrim akan terus berlanjut.

"Maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Artinya laporan kita di Bareskrim akan terus dilanjutkan," tegasnya.

"Seperti diketahui saat ini saya dan teman-teman juga sedang dilaporkan oleh pihak Jokowi di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya," sambungnya. **(bes/js)**

Pakar Singgung Imunitas Politik

Dari Halaman 1

untuk meredam tekanan dan menjaga stabilitas politik Jokowi secara personal.

Selain itu, ia mengatakan, spekulasi itu menguat usai Jokowi yang beberapa waktu lalu secara terbuka menyuatkan dukungan dua periode bagi Prabowo-Gibran.

Tak hanya itu, Iqbal juga menyinggung soal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru-baru melantik pengurus baru di bawah kepemimpinan putranya Kaesang Pangarep.

Jokowi juga disebut-sebut akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Iqbal menduga PSI juga turut dibahas dalam pertemuan dengan Prabowo.

"Menjalin relasi erat dengan Prabowo men-

jadi langkah strategis Jokowi untuk memastikan agenda politiknya. Khususnya membesarkan PSI, tidak mengalami intervensi kekuasaan, misalnya," ujar Direktur Eksekutif SCL Taktika Konsultansi itu.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pertemuan Jokowi dengan Prabowo itu sebagai hal yang baik.

Ia mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan tanda bahwa para tokoh bangsa guyub.

"Bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden bertemu, pemimpin guyub," kata Luhut di Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Samsuoddin menyebut pertemuan

Jokowi dan Prabowo berlangsung dalam suasana hangat dan bersifat silaturahmi.

"Ini pertemuan silaturahmi dengan para tokoh," kata Sjafrie sesuai doa bersama peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan, Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh bangsa, termasuk Jokowi.

"Ya, tokoh-tokoh yang pernah mempunyai jasa kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Saat ditanya apakah Jokowi termasuk dalam jajaran tokoh yang hadir, Sjafrie menjawab singkat, "Ya sebelumnya."

Sjafrie juga menyinggung pesan yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa, terutama di kalangan TNI. **(cnni/js)**

Rusia Bom Perbatasan Ukraina

Dari Halaman 1

mengatakan seorang korban tewas merupakan gadis berusia 16 tahun. Ia sempat terluka dan mendapat pertolongan rumah sakit namun nyawanya tak tertolong.

Fedorov turut membagikan foto-foto yang diambil dari lokasi kejadian, menampilkan sebagian bangunan bertingkat yang hancur dan sebuah mobil yang hangus terbakar.

Peringatan udara nasional diberlakukan di seluruh Ukraina sejak pukul 04.09 waktu setempat (01.09 GMT) imbas serangan terbaru Rusia ini.

Sementara itu, angkatan bersenjata Polandia melalui X menyampaikan bahwa mereka turut

mengerahkan pesawat tempur dan menempatkan pertahanan darat dalam siaga tinggi untuk mengamankan wilayah udara mereka, khususnya di area yang berbatasan langsung dengan Ukraina.

Ini dilakukan kala Polandia mengalami "intrusi" dari drone dan jet tempur Rusia yang beberapa kali menerobos masuk wilayahnya dalam beberapa pekan terakhir kala Moskow melancarkan serangan ke Ukraina.

Wali Kota Lviv, kota di Ukraina yang berbatasan dengan Polandia, mengatakan jalur transportasi umum tidak beroperasi akibat "serangan besar-besaran musuh".

Dikutip AFP, Wali Kota Ivano-Frankivsk, kota lain di Ukraina barat, transportasi umum

juga ikut terdampak imbas serangan Rusia ini.

Rusia juga meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina seiring turunnya suhu udara.

Fedorov mengatakan serangan semalam di Zaporizhzhia menyebabkan lebih dari 73.000 pelanggan kehilangan pasokan listrik. Wali Kota Lviv menyebut sebagian kota juga mengalami pemadaman listrik imbas gempuran.

Pekan ini, Moskow juga melancarkan serangan terbesar yang pernah terjadi terhadap infrastruktur gas Ukraina. Serangan Moskow ikut memutus aliran listrik ke sekitar 50.000 rumah tangga di wilayah Chernigiv bagian utara. **(cnni/js)**

Wewenang Dinas Diambil Alih Bupati

Dari Halaman 1

Pengakuan mengejutkan ini datang saat Suherdi Tarigan dicecar wartawan terkait posisi dinas dalam mekanisme pengelolaan retribusi, khususnya wisata air panas danau lau kawar.

Menurut Suherdi, kewenangan Dinas Pariwisata terhadap pengelolaan PAD, khususnya Wisata Air Panas dan Lau Kawar, diduga telah diambil alih oleh pihak luar yang ditunjuk langsung bupati sebagai koordinatornya, tanpa proses mekanisme yang jelas.

"Itulah ngerinya sekarang ini, wewenang langsung diambil alih oleh bupati sendiri," ujarnya blak-blakan, memberi sinyal kuat kekesalannya dengan sang bupati, Jumat (2/9/2025).

Padahal, lanjutnya, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

bupati memang berhak memberi arah kebijakan, namun pelaksanaan teknis—termasuk urusan pungutan retribusi—sempurnya ranah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Lebih tegas lagi, Perda tentang Retribusi Daerah mengatur bahwa setiap pungutan harus masuk ke kas daerah melalui mekanisme keuangan resmi. Penunjukan langsung di luar struktur formal jelas berpotensi menabrak aturan dan membuka ruang tumpang tindih kewenangan.

Langkah bupati ini juga dinilai rawan menciptakan sentralisasi PAD di tangan kepala daerah yang pada praktiknya bisa kabur pertanggungjawabannya dan rentan disalahgunakan.

Terpisah, menurut pengamat kebijakan publik, Muhri Fauzi Hafiz, praktik semacam

ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius terhadap tata kelola keuangan daerah.

"Jika dibiarkan, bukan hanya melemahkan otoritas Dinas Pariwisata, tetapi juga merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas. Padahal, retribusi pariwisata adalah salah satu tulang punggung PAD Karo," tegasnya.

Kini, bola panas ada di tangan DPRD Karo, Inspektorat, dan aparat penegak hukum. Publik menanti, apakah langkah bupati ini akan dibenarkan sesuai aturan, atau justru terbukti menyimpang dari prinsip Good Governance.

Sebab tanpa pengawasan ketat, retribusi wisata yang seharusnya memperkuat kas daerah bisa bocor menjadi keuntungan kelompok tertentu yang mendapat mandat di luar jalur prosedural. **(A-10)**

Stop MBG, Selamatkan Anak Bangsa!

Dari Halaman 1

penetapan KLB tidak otomatis menghentikan program secara nasional—seolah ingin menegaskan "program unggulan negara" tak boleh terganggu oleh insiden yang disebut "lokal." Padahal, ketika ribuan anak menjadi korban, istilah "lokal" kehilangan relevansi moral dan logika kebijakan. Ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan kegagalan sistemik yang menuntut evaluasi menyeluruh. Skala penderitaan ini sudah cukup untuk menekan tombol jeda: moratorium nasional MBG adalah langkah paling masuk akal, rasional, dan bermartabat sebelum korban bertambah.

Niat Baik, Eksekusi Buruk

Tak ada yang meragukan niat baik di balik program MBG. Visi menekan angka stunting, memperbaiki gizi anak sekolah, dan menutup kesenjangan nutrisi jelas mulia. Namun niat baik tanpa kesiapan hanya melahirkan kebijakan sembrono. Negara tidak boleh memperlakukan jutaan anak sebagai bahan uji coba kebijakan yang belum matang.

Peluncuran MBG dilakukan dengan gegap gempita, namun tanpa kesiapan logistik yang kuat, tanpa uji distribusi yang layak, dan tanpa pengawasan mutu yang ketat. Di banyak daerah, dapur umum dikelola seadanya, bahan

makanan disimpan di tempat tak higienis, dan distribusi dilakukan tanpa rantai dingin. Akibatnya, niat memberi gizi justru berubah menjadi wabah penyakit. Kebijakan yang seharusnya melindungi anak-anak malah menjadi ancaman dalam seragam kebijakan.

Ombudsman Republik Indonesia bahkan menyebut kondisi ini sebagai "darurat MBG"—istilah yang seharusnya mengguncang kesadaran publik dan pemerintah. Namun setiap hari yang berlalu tanpa koreksi berarti satu hari tambahan bagi potensi korban baru. Pertanyaan publik kini menggigit nurani: apakah 9.000 anak sakit belum cukup untuk menghentikan program ini sementara? Atau negara harus menunggu korban jiwa agar sadar sistem ini cacat sejak perencanaan?

Dari Kegagalan Teknis ke Pelanggaran Hak Lambannya respon pemerintah kini tak bisa lagi dianggap sekadar kelalaian teknis, melainkan telah masuk wilayah pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perspektif hak atas kesehatan, pembiaran terhadap risiko yang sudah diketahui adalah bentuk neglignensi negara (state negligence). Bila pemerintah tahu rantai pasok rawan, tetapi tetap melanjutkan program tanpa koreksi berarti, maka tanggung jawab moral dan hukum tak terealisasi.

Anak-anak bukan angka statistik dalam

laporan pembangunan, melainkan warga negara yang hak hidup dan kesehatannya dijamin konstitusi. Karena itu, moratorium nasional MBG bukan tanda kegagalan politik, tetapi tindakan etis untuk menyelamatkan generasi muda. Pemerintah perlu membentuk audit independen atas seluruh rantai pengadaan, produksi, dan distribusi makanan, melibatkan lembaga nonpemerintah dan masyarakat sipil. Publik berhak tahu di mana letak keretakan sistem yang seharusnya menjaga anak-anak mereka tetap sehat.

Jeda Bukan Kekalahan

Tragedi MBG adalah cermin buram tata kelola pemerintahan: ketika ambisi politik menyalip kehati-hatian, dan pencitraan dianggap lebih penting dari keselamatan rakyat. Ini bukan sekadar soal makanan basi, melainkan tentang negara yang kehilangan empati terhadap penderitaan warga kecilnya.

Tugas negara bukan mempertahankan program, melainkan melindungi rakyat. Air mata, belasungkawa, atau janji perbaikan tidak cukup. Jika keselamatan anak-anak belum bisa dijamin, maka menghentikan MBG sementara adalah keputusan paling waras, paling berani, dan paling manusiawi. Dalam dunia kebijakan publik, jeda bukan kekalahan—ia adalah bentuk keberanian moral untuk menyelamatkan nyawa. **(*)**

TNI Timbul Tenggelam ...

Dari Halaman 1

"Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI, kita paham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia, TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya saat berperan sebagai inspektur upacara.

"TNI berasal dari rakyat, TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia, TNI selalu mengabdikan kepada bangsa dan rakyat dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia," ucap Prabowo lagi.

Prabowo menyebut TNI adalah benteng dan tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjamin kedaulatan ketika lingkungan global mengalami ketidakpastian. TNI juga disebut mesti siap menghadapi segala kemungkinan hingga mengikuti perkembangan jaman.

Prabowo juga mengingatkan tugas TNI tidak ringan. Dia menyebut kekayaan alam Indonesia selalu diganggu, diinvasi kekuatan-kekuatan asing.

"Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita, sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yg tidak bertanggung jawab," katanya.

TNI dikatakan harus introspeksi diri. TNI juga mesti membantu penegak hukum, pemerintah, pusat dan daerah, untuk menjaga kekayaan negeri.

"Sekali lagi jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar, saya perintahkan panglima TNI, kepala staf kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia," ujar Prabowo. **(cnni/js)**

Komite Reformasi

Dari Halaman 1

memiliki semangat yang sama dengan tim transformasi reformasi yang dibentuk internal Polri.

Terpisah, Mahfud mengaku menerima tawaran bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Prabowo.

Ia mengaku sudah memberikan kesediaannya untuk terlibat dalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo itu.

Selain Mahfud, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie disebut juga akan masuk ke dalam komite tersebut.

"Sejumlah nama sudah digadag-gadag jadi anggotanya, Pak Mahfud [Eks Ketua MK Mahfud MD], pak Jimly dan lain-lain," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Jakarta, Jumat (26/9). **(cnni/js)**



MBG Gagal di Tangan yang Salah

Dari Halaman 1

Kasus keracunan akibat makanan MBG yang terjadi di beberapa daerah seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Bukan hanya karena menyangkut nyawa anak-anak, tetapi juga karena mencerminkan lemahnya tata kelola program sosial di tingkat daerah. Makanan yang seharusnya menyehatkan justru menjadi ancaman karena kualitasnya tidak terjamin. Ironisnya, sebagian besar kasus ini terjadi akibat pengawasan yang longgar, penyedia tanpa sertifikasi, serta proses pengadaan yang tidak transparan.

Padahal, ide dasar MBG selaras dengan misi besar pembangunan manusia: menurunkan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak. Asupan gizi yang baik berbanding lurus dengan prestasi akademik dan kesehatan mental. Namun, idealisme itu ambruk ketika pelaksanaan di lapangan terjebak dalam pola lama: program yang tergesa-gesa, administrasi kaku, dan lemahnya kontrol publik.

Kita tak bisa menutup mata bahwa di balik program bergizi ini, seringkali tersembunyi kepentingan proyek. Pengadaan makanan diserahkan pada pihak ketiga tanpa mekanisme seleksi ketat, sementara sekolah hanya menjadi penerima pasif. Tidak ada jaminan bahwa makanan diolah sesuai standar higienitas, tidak ada edukasi gizi untuk pelaksana, bahkan tidak ada sistem audit yang memadai. Akibatnya, yang mestinya menjadi berkah gizi, berubah menjadi bencana massal.

Namun menghentikan MBG bukanlah solusi. Menghapus program ini sama saja menutup akses makan bergizi bagi ribuan siswa miskin di pelosok negeri. Dalam konteks ekonomi sulit dan harga pangan yang terus naik, MBG tetap menjadi harapan banyak keluarga. Maka yang perlu dilakukan bukanlah pembatalan, melainkan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan dan pengawasan.

Pertama, pengadaan harus berbasis lokal. Libatkan UMKM, kelompok ibu PKK, dan dapur sekolah dengan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan dan BPOM. Dengan begitu, kualitas bahan pangan terjamin, dan roda ekonomi lokal ikut bergerak.

Kedua, perlu ada sistem transparansi digital, di mana masyarakat dapat memantau pemasok, menu, dan anggaran MBG di tiap sekolah. Ketiga, pendidikan gizi harus menjadi bagian integral dari program — bukan sekadar bagi siswa, tetapi juga bagi pengelola dan orang tua.

Negara tidak boleh gagal dua kali: gagal menyediakan gizi bagi anak, dan gagal melindungi mereka dari kelalaian sistem. MBG adalah gagasan visioner yang seharusnya menjadi warisan sosial penting, bukan bahan olok-olok karena salah urus. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus berani melakukan evaluasi total, menindak tegas penyedia nakal, dan membangun sistem pengawasan partisipatif.

Di tengah maraknya berita keracunan, jangan biarkan kepercayaan publik hilang begitu saja. Kita perlu menyelamatkan ide besar di balik program MBG bukan dengan membubarkannya, tetapi dengan mengembalikannya ke jalan yang benar: transparan, higienis, dan berpihak pada anak-anak bangsa. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak akan kuat jika generasinya tumbuh tanpa gizi yang layak dan tanpa tanggung jawab dari para pemimpinnya.